



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas
Hari, Tanggal	:	Rabu, 27 Januari 2021
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	:	Drs. Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	:	1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Lemhannas dan Wantannas; 2. Realisasi Anggaran Lemhannas dan Wantannas T.A. 2020; 3. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun 2021; 4. Isu-isu aktual terkait dengan Lemhannas dan Wantannas.
Hadir	:	PIMPINAN: 1. Meutya Viada Hafid (F-PG) 2. Drs. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) 3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra) 4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD) 5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Charles Honoris
9. Junico BP Siahaan, S.E.
10. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
11. Ir. Rudianto Tjen
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
18. I. Lodewijk F. Paulus
19. Dr. H.M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
20. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
21. Ilham Pangestu

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

22. Sugiono
23. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
24. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
25. Rachel Maryam Sayidina
26. Fadhlullah, S.E.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

27. Prananda Surya Paloh
28. Kresna Dewanata Phrosakh
29. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
30. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

31. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
32. Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
33. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
34. A. Helmy Faishal Zaini
35. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

36. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
37. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
38. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
39. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

40. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
41. H. Sukamta, Ph.D.
42. KH. Toriq Hidayat, Lc.
43. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

44. Ir. Alimin Abdullah
45. H. A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P.
46. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
47. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

48. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
49. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

- Anggota yang Izin : 1. Nurul Arifin, M.Si. (F-PG)
2. R. Imron Amin, S.H., M.H. (F-GERINDRA)
3. Muhammad Farhan (F-NASDEM)
- Undangan : 1. Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo.
2. Sesjen Wantannas, Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro,
S.Sos., S.H., S.PI., M.H.
Beserta Jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Ibu/Bapak,

Hari ini kita melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Lemhannas dan Wantannas. Mungkin kita baru pertama kali dengan Sesjen yang baru, sebelumnya kalau tidak salah polisi, Plt.nya, Sesjen Wantannas Laksamana Madya Haryo Susmoro. Tentu gubernur masih sama, Wakil Gubernur Lemhannas, Pak Wiko Sofhan.

Ibu/Bapak,

Berdasarkan catatan Sekretariat, sudah 7 anggota hadir secara fisik, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Tubagus Hasanudin, dan beberapa sudah di virtual, oleh karenanya kami menyatakan rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)
(RAPAT TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)

Sebelum kita mulai, agendanya adalah: a. Evaluasi Pencapaian Kinerja Lemhannas dan Wantannas Tahun 2020; kemudian b. Realisasi Anggaran Lemhannas dan Wantannas tahun yang sama; c. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN 2021; serta Isu-isu aktual terkait dengan Lemhannas dan Wantannas.

Apakah agenda ini bisa disetujui? Setuju ya Pak TB? Enak juga, kadang-kadang, sesekali, 1 orang doang. Kalau banyak, minta persetujuan banyak orang. Memang yang distributor tunggal itu paling enak, menguasai pasar.

Ibu/Bapak,

Kita mulai dengan pemaparan dari Pak Gubernur Lemhannas, kemudian nanti Pak Laksamana Madya Haryo Susmoro.

Silakan Pak.

GUBERNUR LEMHANNAS (LETJEN TNI (PURN.) AGUS WIDJOJO) :

Yang terhormat Ketua Komisi I DPR RI atau Pimpinan Sidang,
Beserta segenap Anggota Komisi I DPR RI,
Yang kami hormati Sekretaris Dewan Ketahanan Nasional,
Para Pejabat serta para Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian.
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI dalam keadaan sehat wal afiat.

Berdasarkan surat undangan Wakil Ketua DPR RI tanggal 22 Januari 2021 tentang Rapat Dengar Pendapat yang membahas beberapa agenda antara lain:

1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Lemhannas RI Tahun 2020;
2. Realisasi Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020;
3. Persiapan dan Kesiapan APBN Lemhannas RI Tahun 2021; dan
4. Isu-isu aktual terkait dengan Lemhannas RI.

Ketua Komisi I dan Anggota Dewan yang berbahagia,

Sebelumnya izinkan saya untuk menyegarkan kembali tentang tugas dan fungsi Lembaga Ketahanan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Lemhannas RI merupakan lembaga strategis terkait dengan usaha bangsa Indonesia untuk memelihara, melestarikan, dan mengintegrasikan segenap unsur kekuatan nasional yang menjadi pusat pendidikan dan pengkajian masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan ketahanan nasional dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan negara dan bangsa.

Lemhannas RI memiliki tugas utama sebagai pembina ketahanan nasional, dengan cara menyiapkan kader dan pimpinan nasional, serta memantapkan seluruh komponen bangsa yang berwawasan kebangsaan, dan melakukan kajian yang bersifat strategis yang diperlukan presiden untuk menjaga keutuhan NKRI serta melakukan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara kondisi yang akan dicapai secara nyata yang merupakan sasaran strategis Lemhannas RI adalah terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh, di pusat dan di daerah, melalui program pengembangan ketahanan nasional.

Ketua Komisi I dan Anggota Dewan yang berbahagia,

Pada agenda pertama rapat hari ini adalah evaluasi capaian kinerja Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020. Dapat kami sampaikan bahwa capaian kinerja Lemhannas RI TA 2020 adalah sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan atas akuntabilitas laporan keuangan Lemhannas RI oleh BPK RI pada Tahun 2015 sampai dengan 2019 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian/WTP, sementara untuk hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2020 akan dilaksanakan dalam bulan Februari 2021.
2. Hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP Lemhannas RI TA 2020 oleh Kemenpan RB sudah dilaksanakan pada bulan November 2020, namun hasilnya masih dalam proses.
3. Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Lemhannas RI TA 2020 oleh Kemenkeu RI mendapatkan nilai 97,84 dengan kategori sangat baik.

Ketua Komisi I dan Anggota Dewan yang berbahagia,

Agenda kedua terkait realisasi anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020. Dapat kami sampaikan bahwa pagu awal anggaran, saya ulangi, bahwa pagu awal Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020 adalah Rp204.233.517.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Program dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar Rp149.634.816.000,00,
- Program pengembangan ketahanan nasional sebesar Rp52.808.838.000,00,
- Program pengawasan internal sebesar Rp1.789.863.000,00.

Namun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Lemhannas RI mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp14.802.487.000,00 sehingga menjadi Rp189.431.030.000,00. Realisasi anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp176.265.110.244,00 atau sebesar 93,05% dari pagu, dengan rincian per program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dengan pagu awal Rp149.634.816.000,00 mengalami efisiensi sebesar Rp1.288.800.000,00 dan mendapat alokasi dukungan Covid sebesar Rp4.611.605.000,00. Pagu menjadi Rp152.950.621.000,00, yang terealisasi sebesar Rp144.353.693.238,00 atau sebesar 94,37% dari pagu awal. Sisa anggaran sebesar Rp8.603.925.762,00 yang tidak terserap adalah belanja pegawai, gaji 13 dan 14, serta alokasi gaji CPNS, perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, serta operasional tagihan listrik, telepon, gas, dan air, akibat adanya sistem *work from home*.
2. Program pengembangan ketahanan nasional dengan pagu awal Rp52.808.838.000,00 mengalami efisiensi sebesar Rp17.989.889.000,00. Sehingga pagu menjadi Rp34.818.949.000,00, terealisasi sebesar Rp30.268.137.978,00 atau 57,32% dari pagu awal. Sisa anggaran sebesar Rp4.550.811.022,00 tidak dapat terserap disebabkan dukungan makan peserta yang tidak diberikan karena pelaksanaan dilakukan secara virtual.
3. Program pengawasan internal dengan pagu awal Rp1.789.863.000,00 mengalami efisiensi sebesar Rp135.403.000.000,00 sehingga pagu menjadi Rp1.654.460.000,00, terealisasi Rp1.643.279.028,00 atau sebesar 91,81% dari pagu awal. Sisa anggaran sebesar Rp11.180.972,00 merupakan sisa-sisa dari belanja bahan.

Selanjutnya realisasi kerja kegiatan, saya ulangi, realisasi kinerja yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ketahanan nasional yang tangguh, antara lain:

1. Pendidikan kader pimpinan tingkat nasional dan program pemantapan pimpinan daerah, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencetak kader pimpinan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, agar terampil menyelesaikan permasalahan baik lingkup nasional, regional, maupun global, sehingga mampu menjadi pemimpin yang disegani oleh masyarakat atau bangsa, di dalam maupun di luar negeri, yang membuat ketahanan nasional dapat meningkat menjadi tangguh. Pada Tahun 2020, pendidikan tingkat nasional menghasilkan lulusan program pendidikan reguler angkatan ke-60 sebanyak 100 orang, lulusan PPRA ke-61 sebanyak 100 orang, dan lulusan Program Pemantapan Pimpinan Daerah angkatan ke-11 atau PPPDA sebanyak 26 orang. Akibat adanya pandemi Covid-19, kegiatan olah sistem manajemen nasional, studi strategis dalam negeri, dan studi strategis luar negeri, yang merupakan bagian dari rangkaian pendidikan, guna mempelajari dan memahami langsung terkait ketahanan nasional khususnya geo strategik nasional dan internasional yang terjadi pada suatu locus, tidak dapat dilaksanakan PPRA 60, sedangkan PPRA 61 hanya melaksanakan Olah Sismenas secara virtual. Peserta PPPDA ke-11 dari rencana diikuti 50 orang, hanya terpenuhi 26 orang peserta. Hal ini disebabkan banyak kepala daerah atau bupati/walikota, pimpinan DPRD kabupaten/kota memilih fokus penanganan Covid-19 dan sebagian daerah

juga menyelenggarakan pilkada, sehingga target yang dialokasikan 50 orang hanya dapat diikuti oleh 26 orang peserta.

2. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang menjangkau seluruh komponen bangsa, untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, hanya dapat merealisasikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan adalah sebagai berikut:
 - a. Dialog wawasan kebangsaan direncanakan 200 orang pada 2 locus, terealisasi 100 orang pada 1 locus, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan 1 locus tidak terlaksana karena efisiensi anggaran untuk Covid-19.
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan direncanakan 200 orang pada 2 locus, terealisasi 100 orang pada 1 locus, Bandung, dan 400 orang secara virtual.
 - c. Pelatihan untuk pelatih nilai-nilai kebangsaan direncanakan 200 orang pada 2 locus, terealisasi 850 orang secara virtual.

Perubahan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dari locus tatap muka menjadi virtual secara kuantitas, naik, namun output kualitas menurun karena kendala jaringan serta beberapa materi pelatihan yang dapat menumbuhkan kecintaan kepada lingkungan sosial dan alam Indonesia, tidak dapat dilaksanakan.

3. Melakukan kajian dalam berbagai bidang strategis nasional, regional, dan internasional, sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pemerintah. Pengkajian strategis ini menghasilkan 4 naskah kajian jangka panjang, 4 naskah kajian *quick response*, 9 kegiatan pengembangan kajian dan 16 naskah observasi pra kajian. Satu naskah observasi pra kajian tidak dapat terlaksana, disebabkan adanya efisiensi anggaran kedeputusan strategis Lemhannas RI. Selain itu telah dilaksanakan Jakarta Geopolitical Forum ke -4, dengan tema, *Geopolitical Landscape in the Covid-19 Era*, sebagai bahan penelaahan implikasi Covid-19 terhadap geopolitik global, yang telah dilaporkan hasilnya kepada presiden melalui Menteri Sekretariat Negara.
4. Kegiatan pengukuran ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional, untuk mewujudkan sistem pengukuran ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional yang kredibel, sebagai data bagi para pemangku kepentingan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: review, up date dan validasi model sistem pengukuran ketahanan nasional, pengembangan sistem informasi pengukuran ketahanan nasional, dan laporan ketahanan nasional, sehingga menghasilkan data ketahanan nasional Tahun 2020 di 34 provinsi di Indonesia. Data ketahanan nasional tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa instansi, seperti MPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Ketahanan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Riau, Provinsi Bali, dan Provinsi Lampung. Pengukuran data kepemimpinan nasional tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 dan efisiensi anggaran.

Ketua Komisi I dan Anggota Dewan yang berbahagia,

Sebelum menyampaikan agenda ketiga terkait Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021, kami sampaikan perbandingan anggaran tahun 2020 dengan Tahun 2021. Secara umum terdapat penurunan anggaran di Tahun 2021, dibandingkan dengan Tahun 2020, baik pada pagu awal maupun setelah pagu efisiensi. Anggaran Lemhannas RI Tahun 2021 sebesar Rp182.375.470.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program pengembangan ketahanan nasional dengan pagu Rp40.540.844.000,00

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, dengan pagu Rp141.834.626.000,00

Namun sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, Lemhannas RI mengalami realokasi anggaran sebesar Rp13.820.967.000,00 menjadi Rp168.554.503.000,00.

Terkait target pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2021, Lemhannas RI memiliki rencana kerja sebagai berikut:

1. Pendidikan reguler angkatan ke-62, dengan target 80 orang lulusan, dimana semua pelaksanaan studi strategis dalam negeri dengan tujuan kota-kota di luar Jawa, karena adanya refocussing dan realokasi anggaran, tujuan SSDN diubah menjadi kota-kota di dalam pulau Jawa.
2. Pendidikan singkat angkatan ke-23 dengan target 60 orang lulusan, semua pelaksanaan studi strategis dengan tujuan negara Jepang, Turki, dan Selandia Baru, dengan adanya refocussing dan realokasi anggaran, tujuan SSLN diubah menjadi ke negara-negara di lingkungan Asia Tenggara.
3. Prioritas nasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan target 100 orang, semula kegiatan dilaksanakan tatap muka di Provinsi Papua Barat. Karena pandemi Covid-19, kegiatan akan dilaksanakan secara virtual, dengan target 400 orang, diutamakan personil dari Provinsi Papua Barat.
4. Prioritas nasional pelatihan untuk pelatih nilai-nilai kebangsaan dengan target 100 orang, semula kegiatan dilaksanakan tatap muka di Provinsi Jawa Timur. Karena pandemi Covid-19, kegiatan akan dilaksanakan secara virtual, dengan target 400 orang, diutamakan personil dari Provinsi Jawa Timur.
5. Prioritas nasional dialog wawasan kebangsaan dengan target 1400 orang. Semula kegiatan dilaksanakan tatap muka, karena pandemi Covid-19, kegiatan juga akan dilaksanakan secara virtual.
6. Pengkajian strategik di 8 bidang Astagatra, dengan target 4 kajian jangka panjang, 4 kajian urgent dan cepat, dan 9 observasi prakajian atau UPK. Dengan adanya refocussing dan realokasi anggaran target, kajian hanya menjadi 4 kajian jangka panjang dan 4 kajian urgent dan cepat.
7. Pengukuran ketahanan nasional di 34 provinsi di Indonesia tetap dilaksanakan secara daring.

Ketua Komisi I dan Anggota Dewan yang berbahagia,

Agenda terakhir terkait isu-isu aktual yang akan dilaksanakan Lemhannas RI di Tahun Anggaran 2021. Isu-isu aktual tersebut diimplementasikan dalam bentuk seminar nasional dan internasional serta kajian strategik. Jumlah kajian isu-isu aktual yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, berkurang dari rencana 4 observasi pra kajian bidang ideologi politik, 1 OPK bidang ekonomi, SKA, 2 OPK bidang sosial budaya, demografi dan 2 OPK bidang hankam geografi, tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Isu-isu aktual yang akan dibahas dalam kajian strategik Lemhannas RI Tahun 2021 antara lain:

1. Pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia,
2. Hilirisasi mineral dan unsur tanah jarang guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,

3. Peran media sosial guna mengembangkan wawasan kebangsaan, dan
4. Mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua.

Ketua Komisi I dan Anggota Dewan yang berbahagia,

Sebagai penutup dapat kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, kinerja pelaksanaan anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan, walaupun dengan dukungan anggaran yang terbatas, dengan indikator yaitu predikat WTP dan nilai kerja dari Kemenkeu adalah sangat baik.
2. Program/kegiatan Lemhannas RI 2020 selama pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan adanya efisiensi anggaran, maka banyak kegiatan yang berubah bentuk outputnya.
3. Program kegiatan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021 siap dilaksanakan dengan memaksimalkan dukungan anggaran yang terbatas serta mengikuti protokol kesehatan,
4. Isu-isu aktual Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam kajian strategik sebagai bahan masukan kepada Pemerintah untuk mempercepat sasaran pembangunan nasional.
5. Lemhannas RI sampai saat ini hanya mempunyai satu program prioritas nasional, yaitu Pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
6. Sesuai dengan Permenkeu Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021, narasumber internal tidak mendapatkan honorarium. Sebagai saran, Lemhannas RI telah mengusulkan untuk program pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik dan pengukuran ketahanan nasional sebagai prioritas nasional. Serta akan dibuat penyusunan Standar Biaya Masukan lainnya, untuk mengakomodasikan honorarium narasumber internal Lemhannas. Mohon Komisi I dapat memberikan bantuan dukungan atas usulan tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman, kami bersedia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, karena kami hadir pada hari ini juga disertai, didampingi oleh staf-staf fungsional.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.
Om Santi Santi Santi Om.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Terima kasih Pak Agus Widjojo.

Ini benar lho Pak, Widjojo kan? Karena anak sekarang enggak tahu ejaan yang disempurnakan, jadi bacanya Wijoyo. Ini Wijoyo. Kalau Pak Harjo, benar Pak Haryo toh Pak? Harjo? Oh, tapi Bapak kelahiran tahun 60-an kan? Oh diubah? Saya pikir tadi Haryo tadi. Yang benar Harjo? Nah ini memang ke depan, harus punya standar yang baku.

Saya persilakan Pak, sebelum ke Pak Sekjen Wantannas, tadi ada 2 permohonan dari Pak Wakil Gubernur Lemhannas bahwa memang perjalanan anggarannya menurun terus, Rp204 miliar, terus 189, tahun ini 182, belum dijalani sudah turun lagi, 168,8. Padahal yang menyusun *World Best Finance Minister for 3 years in arrow*. Artinya susunan itu digedok 25

September, dijalani belum, sudah diubah. Tapi beliau selalu bilang, "Saya tidak ingin ada APBN perubahan". Yang ngomong, *World Best Finance Minister for 3 years in arrow*.

Saya persilakan Pak Sesjen Wantannas, Laksamana Madya Harjo Susmoro.

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah, wassalatuwassalamu rasulillah, ama ba'du.

**Yang terhormat, Ketua Komisi I DPR RI,
Para Pimpinan dan segenap anggota Komisi I DPR RI,
Para Hadirin dan undangan yang kami hormati dan kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini, dalam keadaan sehat wal afiat, untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan Komisi I DPR RI.

Sebelum memasuki agenda kegiatan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Karena sebagai pejabat baru, kami, Harjo Susmoro, Laksamana Madya TNI, yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/PPA tahun 2020 tanggal 23 September 2020, saya resmi diangkat menjadi Sesjen Wantannas.

Sesuai dengan surat undangan dari Sekjen DPR RI Nomor PW-01/008/DPRRI/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, agenda RDP pada pagi ini akan membahas perihal Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020; Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun 2021; serta Isu-isu aktual Wantannas.

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan,

Dapat kami laporkan evaluasi pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 Setjen Wantannas sebagai berikut: bahwa Tahun 2020 Setjen Wantannas memperoleh pagu awal sebesar Rp46.769.195.000,00. Namun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, untuk penanganan dampak Covid-19, Setjen Wantannas melakukan refocussing anggaran sebesar Rp483.365.000,00, sehingga anggaran Setjen Wantannas berkurang menjadi Rp46.285.830.000,00.

Selanjutnya pada bulan Juni 2020, Setjen Wantannas mengajukan permintaan tambahan anggaran belanja pegawai melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp2.765.422.000,00 untuk kekurangan belanja pegawai Setjen Wantannas dan mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S.127/MK.2/2020 tanggal 20 Juni 2020, sehingga anggaran Setjen Wantannas tahun anggaran 2020 bertambah menjadi Rp49.051.252.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, telah terealisasi sebesar Rp45.884.008.145,00 atau 93,54%. Dan terjadi pengembalian ke kas negara sebesar Rp3.167.243.855.000,00 atau 6,46%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah terkait tunjangan dan gaji ke-13 dan 14 yang tidak dibayarkan sebesar Rp2.334.822.760,00 dan Rp832.421.095.000,00 dikarenakan adanya efisiensi penggunaan daya listrik selama pandemi Covid-19.

Secara umum, realisasi anggaran Setjen Wantannas Tahun Anggaran 2020 dapat kami jelaskan sebagai berikut: menurut jenis program, program 01, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan anggaran sebesar Rp39.804.133.000,00 terealisasi sebesar Rp36.923.987.298,00 atau 92,76%. Dan program 06, pengembangan kebijakan ketahanan nasional dengan anggaran sebesar Rp9.247.119.000,00 terealisasi sebesar Rp8.960.020.847,00 atau 96,90%.

Sedangkan menurut jenis belanja, dapat kami jelaskan, belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp27.073.906.000,00 terealisasi sebesar Rp24.739.083.240,00 atau 91,38%, sehingga belanja pegawai yang tidak terserap sebesar Rp2.334.822.760,00. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait tunjangan dan gaji ke-13 dan 14 yang tidak dibayarkan sebagai mana kami jelaskan di atas.

Demikian juga untuk belanja barang, dengan anggaran sebesar Rp21.936.938.000,00 terealisasi sebesar Rp21.104.516.905,00 atau 96,21%, sehingga belanja barang yang tidak terserap dan dikembalikan kepada kas negara sebesar Rp832.421.095,00 dikarenakan adanya efisiensi penggunaan daya listrik selama pandemi Covid-19. Kemudian belanja modal dengan anggaran sebesar Rp40.408.000,00 terealisasi 100%.

Menurut jenis kegiatan, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan anggaran sebesar Rp39.804.133.000,00 terealisasi sebesar Rp36.923.987.298,00 atau sekitar 92,76% dengan rincian sebagai berikut:

- Pengelolaan perencanaan, organisasi, dan keuangan, output 5 layanan, dengan anggaran sebesar Rp28.044.880.000,00 yang didalamnya terdapat belanja pegawai dan belanja barang non operasional telah tercapai output 5 layanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp25.675.910.446,00 atau 91,55%.
- Pengelolaan persidangan, sistem informasi dan pengawasan, output 3 layanan, dengan anggaran sebesar Rp757.210.000,00 telah tercapai output 3 layanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp743.799.887,00 atau 98,23%.
- Dan pengelola internal perkantoran, output 5 layanan dengan anggaran sebesar Rp11.002.000.063,00 telah tercapai output 5 layanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.504.276.965,00 atau 95,48%.
- Program pengembangan kebijakan ketahanan nasional dengan anggaran sebesar Rp9.247.119.000,00 terealisasi sebesar Rp8.960.020.847,00 atau 96,90% dengan rincian sebagai berikut:
 - Perumusan kebijakan sistem nasional, output 16 naskah, dengan anggaran sebesar Rp2.262.677.000,00, telah tercapai output 16 naskah dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.179.547.005,00 atau 96,33%.
- Perumusan kebijakan politik dan strategi nasional, output 16 naskah, dengan anggaran sebesar Rp2.155.916.000,00 telah tercapai output 16 naskah dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.096.597.778,00 atau 97,25%.
- Perumusan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman, output 15 naskah dengan anggaran sebesar Rp2.129.806.000,00 telah tercapai output 15 naskah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.063.333.026,00 atau sekitar 96,88%.
- Kebijakan evaluasi implementasi dan ... (suara tidak jelas) pembangunan, output 20 naskah dengan anggaran sekitar Rp2.248.256.000,00, telah mencapai output 20 naskah dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.181.098.038,00 atau 97,01%.
- Kebijakan strategis terkait keahlian tertentu, output 6 naskah dengan anggaran sebesar Rp159.300.000,00 telah mencapai output 6 naskah dengan realisasi anggaran sebesar Rp157.599.000,00 atau 98,93%.

- Dan aksi Bela Negara, output 1 aksi dengan anggaran sebesar Rp291.164.000,00 telah mencapai 1 aksi, dengan realisasi anggaran sebesar Rp281.846.000,00 atau 96,80%.

Dalam pencapaian output kinerja Tahun 2020, Sekjen Wantannas telah melakukan kajian sebanyak 3 naskah dan terealisasi 3 naskah. Kajian dinamis sebanyak 27 naskah, terealisasi 27 naskah. Kajian ... sebanyak 44 naskah, terealisasi 48 naskah. Dan kajian Bela Negara sebanyak 1 aksi, terealisasi 1 aksi. Oleh karena itu jumlah output yang tercapai sebanyak 78 naskah dan 1 aksi.

Pada rapat koordinasi ... (suara tidak jelas) tanggal 22 September 2020, Setjen Wantannas mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ... (suara tidak jelas) sebanyak 10 kali berturut-turut dari Tahun 2009 sampai Tahun 2019.

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan,

Adapun dalam persiapan pelaksanaan APBN Tahun 2021, Setjen Wantannas mengajukan anggaran sebesar Rp157.311.840.500,00 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas melalui surat Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor P/61/SB/05/2020 dan P/62/SB/05/2020 tanggal 24 Februari 2020, perihal Penyampaian ... (suara tidak jelas) Baru Tahun Anggaran 2021 dengan yang ... (suara tidak jelas) sebagai berikut: Program dukungan manajemen dengan pengajuan sebesar Rp56.158.345.000,00 dan program kebijakan dan strategi ketahanan nasional dengan pengajuan sebesar Rp140.153.451.500,00.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S903/MK.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020, Setjen Wantannas hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp50.436.830.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Menurut jenis program, program dukungan manajemen Rp42.448.268.000,00 yang terdiri dari Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp760.359.000,00, Biro Persidangan, Resiko, dan Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp685.179.000,00 dan Biro Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.002.730.000,00. Program kebijakan dan strategi nasional sebesar Rp7.988.562.000,00 yang terdiri dari ... nasional dialokasikan anggaran sebesar Rp1.924.012.000,00. Staf ahli dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp153.060.000,00. Kedeputian Politik dan Strategi dialokasikan anggaran sebesar Rp1.736.078.000,00. Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan dialokasikan anggaran sebesar Rp1.736.078.000,00. Kedeputian Pengembangan dialokasikan anggaran sebesar Rp2.321.968.000,00. Aksi Bela Negara dialokasikan anggaran sebesar Rp117.366.000,00.

Sedangkan menurut jenis belanja, belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp28.459.484.000,00 atau 56,42% dari total anggaran. Belanja barang dengan pagu sebesar Rp21.977.346.000,00 dan pagu Tahun 2021 sebelumnya sekitar Rp50.436.830.000,00.

Apabila ditinjau menurut klasifikasi rincian output, terdiri dari: Program kebijakan dan strategi ketahanan nasional dengan ... (suara tidak jelas) KRO, yaitu kebijakan-kebijakan energi dan sumber daya alam, kebijakan bidang sosial, kebijakan bidang tata kelola pemerintahan, kebijakan bidang teknologi informasi, kebijakan bidang ekonomi dan keuangan, kebijakan bidang hukum dan HAM, kebijakan bidang pertahanan keamanan, kebijakan bidang iptek, pendidikan, dan kebudayaan, serta kebijakan bidang politik. KRO tersebut terbagi ke dalam 4 kedeputian yaitu Kedeputian Pengkajian dan Pengembangan, Kedeputian Sistem Nasional, Kedeputian Politik dan Strategi, dan Kedeputian Pengembangan, serta 5 staff ahli, dengan total anggaran Rp7.988.562.000,00.

Program dukungan manajemen dengan 13 KRO yaitu layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan monitoring dan evaluasi internal, pengelolaan keuangan negara, layanan kebijakan persidangan lembaga eksekutif, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan pengawasan internal, layanan perkantoran, layanan umum, layanan sarana internasional, layanan SDM, dan layanan umum dengan total anggaran Rp42.488.268.000,00.

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan,

Selanjutnya mengenai isu-isu aktual Dewan Ketahanan Nasional, dapat kami sampaikan terkait pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, negara Indonesia memiliki tujuan nasional yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dalam upaya perdamaian abadi dan keadilan sosial,

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Pak Harjo, mohon di ... (suara tidak jelas)

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Baik, terima kasih.

Jadi terkait dengan pembentukan Dewan Ketahanan Nasional ini, ini merupakan kegiatan yang diamanahkan dalam Perpres, dalam RPJMN 2015-2019 yang belum terlaksana, dan ditekankan kembali di RPJMN 2020-2024. Hal ini menjadi sangat penting karena lembaga ini yang saat ini, Wantannas ini, yang diketahui hanya Setjen ke-Wantannas-an saja, Bapak. Jadi Wantannas sendiri boleh dikatakan sebenarnya belum bekerja, Wantannasnya. Tetapi Setjen Wantannas, ini yang bekerja di outputnya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana amanah dalam Keppres 101 Tahun 1999. Itulah sebabnya keberadaan Wantannas seperti yang berada di negara-negara lain, Amerika, Turki, Thailand, Inggris, dan lain sebagainya, termasuk PBB, pentingnya Dewan Keamanan Nasional ini menjadi hal-hal yang sangat penting untuk menghadapi, menjamin stabilitas keamanan nasional yang saat ini sudah tidak menjadi fokus atau mungkin domain salah satu kementerian atau salah satu kelembagaan. Dan masalah keamanan nasional harus diselesaikan secara komprehensif. Hingga saat ini Wantannas sudah melaksanakan kegiatan dengan berkoordinasi dengan Menpan RB, Menkopolkam dan berbagai kementerian/lembaga serta tokoh masyarakat, akademisi, para pakar, untuk melakukan ... (suara tidak jelas) *alhamdulillah*, ini sudah jalan dan Insha Allah RPerpres sudah kami kirimkan ke Kemenpan RB, dan sekarang sebagai pemrakarsa, yang awalnya pemrakarsa adalah Menkopolkam. Nah sekarang kami tinggal menunggu tindak lanjut adalah untuk melaksanakan studi banding ke luar negeri, sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Presiden.

Demikian Pimpinan rapat, yang dapat kami sampaikan. Dan kami siap untuk pendalaman, atau ... suara tidak jelas) kami siap memberikan penjelasan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Walaikumsalam.

Sebelum teman-teman anggota Komisi I melakukan pendalaman, kami perkenalkan anggota Komisi I yang baru, Bapak Anton, ini sebentar lagi akan menggantikan Pak Riefky menjadi Pimpinan Komisi I, karena Pak Riefky akhir-akhir ini selalu sibuk sebagai Sekjen Partai Demokrat. Beliau putranya Mayor Jenderal Soeratto, ... (suara tidak jelas) dan Beliau ini cukup aktif.

Ibu/Bapak,

Saya persilakan, kalau ada yang mau bertanya. Sudah ada 2 penanya, hanya memang konsep *national security council* yang ... tapi memang kalau kita berpikir lebih dalam, terlalu banyak beban legislatif ... pada saat ... (suara tidak jelas) ... kalau kajian, hampir semua orang bisa melakukan. ... (suara tidak jelas), expertise seperti itu yang ...

Ibu/Bapak,

Di meja pimpinan sudah ada 2 penanya, yang pertama Mayor Jenderal Purn. TB Hasannudin, yang berikutnya ... (suara tidak jelas)

Silakan Pak TB.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya mohon maaf, ini agak ... dan agak panjang.

Yang pertama, Pak Gubernur Lemhannas, ... (suara tidak jelas) pertama, produk-produk dari ... (suara tidak jelas) kami mencoba memahami ...(suara tidak jelas) sangat ... (suara tidak jelas), apa yang di dapat ... (suara tidak jelas) sehingga banyak menimbulkan pertanyaan, ...(suara tidak jelas) dan dari seluruh ...(suara tidak jelas) saya(suara tidak jelas) juga berkumpul, mempertanyakan (suara tidak jelas) bahwa Lemhannas berpihak ...(suara tidak jelas) dan ini dapat menimbulkan ... (suara tidak jelas) tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu atau tidak pernah mendapatkan ... (suara tidak jelas) sebatas itu kritik terhadap siapapun ... (suara tidak jelas) negara, ... (suara tidak jelas), (suara tidak jelas), itu satu.

Kemudian yang kedua, data yang baik dan benar.

Dan yang ketiga, ...(suara tidak jelas) itu baru prinsip orang ...(suara tidak jelas), prinsip seorang mantan (suara tidak jelas) Dan keluar dari ini, banyak teman-teman baiknya kalau seperti ini maka ... (suara tidak jelas) mungkin ... (suara tidak jelas) dan saya ... (suara tidak jelas), apa yang disampaikan, ...(suara tidak jelas).

Yang kedua, saya tertarik dengan materi, bahasan yang nanti ... (suara tidak jelas) harus diakui, lima tahun terakhir ini ... (suara tidak jelas).. perkembangan ... (suara tidak jelas) itu, baik di dalam ... (suara tidak jelas) maupun di luar... (suara tidak jelas) dulu kami di DPR ini ada ...(suara tidak jelas), kemudian di pemerintahan ada ... (suara tidak jelas) dan disitu ... (suara tidak jelas) Papua ... (suara tidak jelas) tanda tangan itu, ... (suara tidak jelas) orang,

ada. Kemudian ... (suara tidak jelas) jadi semua ... (suara tidak jelas) para tokoh-tokoh, 100 tokoh itu, ... (suara tidak jelas)

Nah kalau kemudian Otsus itu gagal, ... (suara tidak jelas) anggota DPR ... (suara tidak jelas) masalah ... (suara tidak jelas), yang pertama itu persepsi, persepsi tentang Papua itu sah atau tidak dengan adanya peperangan, itu ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Kelompok-kelompok yang tidak inilah yang ... (suara tidak jelas) embrio sekarang ini menolak ... (suara tidak jelas).

Berangkat dari itu, permasalahan yang pertama ... (suara tidak jelas) dengan upaya-upaya pemerintah. Yang kedua, mohon maaf, mau tidak mau, ... (suara tidak jelas) 13 operasi militer di era Orde Baru dilaksanakan, sehingga menimbulkan trauma. Terutama dari tokoh-tokoh ... (suara tidak jelas)

Kemudian yang ketiga itu, ... (suara tidak jelas) ada diskriminasi atau ... (suara tidak jelas) nah ini ... (suara tidak jelas) karena ... (suara tidak jelas) baru-baru saja barangkali ... (suara tidak jelas) dan menurut ... (suara tidak jelas).

Jadi empat poin itulah yang menjadi pokok permasalahan di Papua yang ... (suara tidak jelas). Nah kalau mau ... (suara tidak jelas), keempat poin itu ... (suara tidak jelas) agar pokok masalah ... (suara tidak jelas). Tadi saya kira (suara tidak jelas) dengan segala hormat, kami waktu itu bersama ... (suara tidak jelas) melihat Pak, kemana? Manado.

Di Manado itu, ya mohon maaf, ada ... (suara tidak jelas) kalau malam hari itu, ... (suara tidak jelas) tempat ... (suara tidak jelas), ... (suara tidak jelas) dan para pemimpin dari Papua ... (suara tidak jelas) dan separuh dari hari Minggu itu, ... (suara tidak jelas) lalu ini harus ... (suara tidak jelas) ke mana? Ada banyak ... (suara tidak jelas) tapi saya lihat, contoh terakhir, Saudara Dance. Dance itu sudah ... (suara tidak jelas) menjadi Sekda. Dia seorang yang nasionalis merah putih tapi kemudian ditolak oleh ... (suara tidak jelas) nah Keppres ... (suara tidak jelas) ditolak oleh gubernur, Mendagri pun *hands up*. Jadi, ... (suara tidak jelas) toh ini kan bukan tindakan (suara tidak jelas)? Jadi apakah urusan-urusan ini, urusan presiden, begitu, dipaksakan? Toh ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kadang-kadang kami juga dalam memahaminya itu, ... (suara tidak jelas) saya banyak ... (suara tidak jelas) tokoh-tokoh di Papua, dan mereka masih memungkinkan ... (suara tidak jelas) itu memang beberapa catatan, yang empat poin itu, 1, 2, 3, 4. Saya kira kita ... kalau tidak, mohon maaf, kalau tidak, ... (suara tidak jelas) Papua itu sebagai bagian dari ... (suara tidak jelas) itu yang.

Kemudian untuk Wantannas, Pak, Pak Sesjen, selamat bergabung, ..meriah, penuh duka, dengan jumlah anggaran yang dilihat ini, ... (suara tidak jelas) banyak, ... (suara tidak jelas) nah saya ingin mendalami, dan saya juga kebetulan terlibat dalam RUU ... (suara tidak jelas) dan ini pernah saya paparkan di saat itu adalah Rapat ... (suara tidak jelas) Lemhannas. RUU ... (suara tidak jelas) itu dulu kami seminar dan kemudian ... (suara tidak jelas) yang ... (suara tidak jelas) kemudian juga dari... (suara tidak jelas) kemudian sudah mengerucut, yang bagus, tetapi yang keluar dibawa ke DPR, RUU ... (suara tidak jelas) itu lebih banyak kepada versi TNI, mohon maaf. Seperti apa? Jadi kalau Wantannas itu kan itu sebagai sarana, ketika ada Covid-19 lalu kemudian masih ... (suara tidak jelas) sama Kemenkes dan sebagainya. Nah begitu. Yang lain-lain, membantu. Itu pemikiran awalnya. Kalau kemudian terjadi bencana, siapa *leading sector*-nya? Kemudian dibantu ... (suara tidak jelas) dalam konteks RUU ... (suara tidak jelas) yang kemarin, ... (suara tidak jelas) saya ketua panjanya, itu tidak, ... (suara tidak jelas) kemudian waktu itu RUU BIN belum selesai. Kemudian juga ada pentahapan, apapun masalahnya, diselesaikan oleh komando teritorial. Nah, jadi misalnya Covid, ya sudah, di daerah, pangdam, di daerah lagi, dandim, di daerah lagi, danrem, dan ini saya menjadi ... (suara tidak jelas). Dan dilingkungan pemerintah sendiri waktu itu jadi banyak, Menhan mempertahankan ... (suara tidak jelas) kemudian juga dari Lemhannas, pandangannya, lebih modern, nah itu. Polisi, keberatan, karena dia sebagai ... (suara tidak jelas) padahal di depan

kami, ... (suara tidak jelas) panja ini, ya pemerintah, hanya satu. Sehingga ini menjadi hal-hal yang debatable, kemudian masyarakat sendiri ... (suara tidak jelas).

Nah kalau Wantannas maksud saya, ... (suara tidak jelas) kemudian direvisi lagi dengan Keppres tahun 1999. Acuannya itu adalah Undang-undang Pertahanan, tahun berapa? ... (suara tidak jelas) jadi dari situ, hanya dengan Keppres. Ini akan menjadi perdebatan, apakah Dewan Keamanan Nasional ini cukup dengan Keppres? Dengan ... (suara tidak jelas) dari Wantannas menjadi Kamtannas, atau ... (suara tidak jelas) yang lebih... (suara tidak jelas) nah ini, jangan sampai nanti ... saya tidak tahu, kalau Keppres saja, ... (suara tidak jelas) karena apa? Kalau kamnas itu nanti ada operasionalnya. Kalau Wantannas itu kan ... (suara tidak jelas) kalau ... (suara tidak jelas) dalam ... (suara tidak jelas) ya itu banyak-banyak ... (suara tidak jelas) sehingga ... (suara tidak jelas) mungkin ... (suara tidak jelas) apakah ... (suara tidak jelas) dominan Perpres, atau ... (suara tidak jelas).

Nah berikutnya, karena saya mengikuti soal Bela Negara, mohon izin Pimpinan ya, Bela Negara itu ketika muncul Undang-undang ... (suara tidak jelas) di akhir masa jabatannya ... (suara tidak jelas) 2014-2019, diketok hanya beberapa hari ... (suara tidak jelas) Undang-undang ... (suara tidak jelas) sebelumnya, Bela Negara itu menjadi debatable, siapa ... (suara tidak jelas) lalu Bapak Presiden ... (suara tidak jelas) terus Wantannas. Waktu itu Sesjen Wantannasnya saya lupa, oh ya, Pak Doni. Kemudian ... (suara tidak jelas) tidak, belum dibahas, belum di... kemudian selesai, ... (suara tidak jelas) dengan Undang-undang ... (suara tidak jelas) itu ... (suara tidak jelas) saya mohon, bagaimana mengkompilasi konsep Bela Negara dari Wantannas dengan konsep Bela Negara dari Pertahanan, yang ini supaya ada ... (suara tidak jelas) supaya Bela Negara yang bagian didalamnya itu adalah komponen ... (suara tidak jelas).

Saya kira itu saja Pimpinan, mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Rizki Aulia Rahman, dan dari virtual sudah mendaftar Pak Dave, ... (suara tidak jelas)silakan Pak.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Terima kasih Pak Ketua.

(suara tidak jelas)

... apakah Lemhannas dan Wantannas tersebut memperhatikan ... kepada Bapak, rekomendasi apa Pak, ... (suara tidak jelas) karena ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Pak Dave, silakan. Oh belum Pak? Ini Mbak Nurul Arifin dulu.

Mbak Nurul, siap-siap Pak Dave, silakan.

F-PG (NURUL ARIFIN, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Bapak Agus Widjojo sebagai Gubernur Lemhannas,
Kemudian Sesjen Wantannas Pak Harjo, beserta jajaran yang hadir pada siang hari ini,
Juga rekan-rekan sekalian,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Tadi Pak Jenderal TBH sudah berbicara cukup panjang, dan di awal tadi kita juga sudah mendengarkan satu *concern* Beliau, tentang, yang tidak disampaikan secara jelas begitu, namun halus, namun saya menangkap apa yang dipikirkan itu sama, kira-kira begitu, Pak Gubernur. Bahwa ada keprihatinan tentang pendidikan yang sudah diberikan oleh Lemhannas itu tidak diimplementasikan oleh para alumnusnya, begitu. Malah menjadi apa, corong-corong yang berbicara tentang politik identitas, atau pun anti ideologi, begitu ya. Dan ini menjadi keprihatinan kita semua.

Dan saya melihat di halaman 11, tadi dipaparkannya Pak Gubernur mengatakan akan membahas tentang isu-isu kajian strategis, begitu, diantaranya adalah Pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. Dan ini menjadi *concern* saya mungkin, mewakili banyak orang, Pak, karena sekarang terjadi kristalisasi begitu ya, tentang politik identitas ini. Dan ada satu berita yang bagus saya baca di Kompas tadi halaman 3, bahwa di Sumatera Barat, anak-anak sekolah yang non muslim sudah boleh tidak menggunakan hijab, begitu. Ini suatu kemajuan dan mengembalikan demokrasi di Indonesia yang sesungguhnya, saya kira. Jadi biarkan mereka memilih apa yang menjadi pilihannya, begitu.

Dan saya berharap walaupun dengan situasi yang terbatas karena refocussing anggaran dan sebagainya, namun Lemhannas tetap dapat menjadi satu yang mewarnai kehadiran demokrasi di Indonesia dan pembangunan manusia-manusia di, manusia-manusia politik tentu saja, di negara ini, begitu.

Dan saya mengapresiasi juga peran media sosial untuk mengembangkan wawasan kebangsaan. Memang kita sekarang hidup di era digitalisasi, era 4.0 yang jelas tidak mungkin juga mengabaikan kemajuan-kemajuan digital tersebut. Saya berharap semoga Bapak sukses mengemban tugas dan bisa mengembalikan roh Lemhannas yang dulu sangat kuat membangun demokrasi dan wajah-wajah politisi atau pun birokrat di negara ini. Itu Pak.

Kemudian buat Bapak Harjo, Pak, tadi saya melihat begitu banyak naskah-naskah akademik, kajian, yang dihasilkan, begitu ya. Nah saya ingin tahu Pak, kajian-kajian ini, apakah dipresentasikan, atau pun setelah dipresentasikan, apakah ada yang diakomodir begitu, sehingga menjadi salah satu output dalam pengambilan keputusan di negara ini? Itu saja, terima kasih.

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Waalaiikumsalam.

Mbak Nurul.

Pak Harjo namanya, bukan Haryo. Walaupun Beliau seumuran kita, mungkin kita seumuran, kalau jaman dulu ditulis begini, bacanya Haryo. Yang benar Harjo.

Dari yang hadir fisik sudah tidak ada lagi, oh Pak Anton. Siapa? Pak Mukhlis, Pak Anton. Ini Pak Anton dulu ya? Pemain baru, nomor punggung 10, langsung. Habis itu siap-siap Pak Mukhlis.

F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya hanya singkat saja, yang pertama, untuk Wantannas, sudah sejauh mana Wantannas mengimplementasikan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bela Negara? Dengan anggaran yang minim ini, apa aksi nyata yang dapat Wantannas lakukan untuk mewujudkan hal tersebut?

Yang kedua, ini terserah, mau Lemhannas atau Wantannas, kami mau minta tolong Pak, untuk membuat kajian mengenai pemilu. Pemilu kemarin serentak, pilpres dan pileg digabung menjadi satu. Yang akhirnya memakan korban, kelelahan, kecapean, banyak yang meninggal. Ini juga ada usulan, mungkin belum disahkan juga, mungkin digabung sama pilkada, Pak. Jadi pilpres, pileg, dan pilkada, digabung jadi satu. Ini saya mohon kajian yang mendalam, banyak mudharatnya atau banyak manfaatnya ini Pak? Entah Lemhannas atau Wantannas, kami mohon bantuannya, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Terima kasih.

Yang meninggal sekitar 500-an lebih, Pak Anton. Memang itu selesainya lebih dari 24 jam, sekitar 32 jam rata-rata. Jadi memang itu tidak manusiawi, tetapi faktanya seperti itu, nah itu tadi kajian yang serius, mudah-mudahan bukan hanya Wantannas dan Lemhannas, tetapi Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan DKPP juga melakukan kajian. Kita segera bisa memisahkan yang mudharat dan manfaat.

Berikutnya Pak Mukhlis Basri.

F-PDIP (DRS. MUKHLIS BASRI):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi I, baik yang hadir secara fisik maupun virtual,
Yang saya hormati Gubernur Lemhannas dan juga Pak Sesjen Wantannas beserta seluruh jajaran masing-masing,**

Yang pertama, tadi disampaikan oleh Pak Sesjen Wantannas bahwa ada 78 kajian Pak, selama 2020. Yang saya tanyakan, adakah dari 78 kajian ini yang ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam hal ini katakanlah presiden atau lembaga-lembaga yang lainnya?

Yang selanjutnya, tadi Bapak juga sudah sampaikan, yang WTP 10 kali, dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019. Kemarin itu waktu Menteri Luar Negeri di sini, mereka itu dapat insentif, Pak. Nah apakah pernah juga Bapak, lembaga Bapak ini mendapat insentif dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang sudah dapat 10 kali WTP? Kalau tidak dapat, berarti kan ada, katakanlah mungkin diskriminasi, kenapa lembaga ini dapat, kenapa lembaga ini tidak dapat. Nah ini, atau mungkin Bapak belum pernah mengusulkan?

Selanjutnya yang terakhir, saya sama dengan saudara saya tadi, saya minta kajian Pak, kajian masalah otonomi daerah. Karena otonomi daerah ini sekarang hampir habis, Pak, sepertinya tidak ada lagi otonomi daerah ini. Bayangkan, semua sudah hampir di pemerintah pusat, ya. Mulai dari apa namanya, kelautan, sudah itu kehutanan, pendidikan, ya, sebagian, dulu pendidikan itu Pak, sampai SMA tanggung jawabnya pemerintah daerah kabupaten, sekarang sudah diambil oleh provinsi. Artinya apakah lebih bagus atau lebih rusak, Pak? Maka saya mengharapkan, baik ini Wantannas maupun Lemhannas, mohon kajian Pak, untuk otonomi daerah ini. Kalau menurut saya, hampir habis, Pak. Kalau dulu kan otonomi ini kan otonomi kabupaten, undang-undang kita itu. Tapi sekali lagi, hampir ditarik semuanya, kekuasaan atau otonomi itu.

Saya kira itu saja Pak, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Walaikumsalam.

Pak Mukhlis, DPR RI juga 10 kali WTP berturut-turut, lembaga kita, supaya kita pahami bersama. Kita enggak perlu tepuk-tangan, yang jelas anggaran dipotong juga.

Ibu/Bapak,

Yang hadir semua sudah,

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Boleh tambahan, Ketua, sedikit?

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Boleh, silakan Pak Nico.

Ini hak Bapak-Bapak semua, silakan Pak Nico.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Baik, terima kasih Ketua.

Yang kami hormati Gubernur Lemhannas, Sesjen Wantannas, yang hadir serta jajarannya.

Ada sedikit yang mau saya sampaikan mengenai isu-isu aktual yang akan dibahas dalam kajian strategik Lemhannas yang Bapak sempat sampaikan. Ini ada hal yang menarik,

yaitu adalah dua, ini pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia, dan peran media sosial guna mengembangkan wawasan kebangsaan. Jadi begini Pak, kalau saya melihat bahwa pengalaman saya ikut, walaupun cuma dalam kursus singkat, kemudian juga melihat siapa-siapa saja yang ikut memang, lembaga ini memang lembaga elit, mendidik pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada tokoh-tokoh nasional. Tapi dengan jumlah yang memang terbatas, ya, saya melihat bahwa permasalahan utama di lapangan itu generasi muda kita, justru. Ini dari mulai anak-anak, siswa SD, SMP, SMA, itu yang namanya polarisasi dan politik identitas itu sudah masuk sampai ke tingkat pendidikan mereka. Tapi kita hanya melihat politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. Padahal kehancuran terhadap generasi bangsa, yang sudah mempunyai bibit intoleransi sejak kecil, itu perlu sekali kita dalam sebagai isu-isu aktual, Pak. Jadi bukan hanya di level pilkadanya, tapi di level generasi muda yang sudah terasuki itu Pak, mereka melakukan pernyataan sikap di kampus-kampus. Ini kan artinya sudah banyak yang melakukan infiltrasi, indokrisasi, di SD, di tingkat pendidikan apapun itu. Nah saya rasa itu juga bisa menjadi isu-isu aktual, karena kita jarang sekali memberi perhatian yang lebih terhadap generasi muda, padahal mereka ini generasi milenial ini yang lahir pada tahun '80 jumlahnya sudah 67% Pak, bayangkan saja. Dan kalau mereka tidak kita perkuat, tidak dimasukkan ke dalam isu-isu ini, menurut saya, kita seperti melihat generasi muda hanya sebagai penumpang saja. Kita sebagai supir-supirnya ini tidak memperhatikan nasib penumpang-penumpang kita. Itu satu.

Dan kedua, mengenai anggaran. Ini kalau saya bicara anggaran, sedikit saja. Kalau kita melihat ini ada Dewan Keamanan Nasional, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak TB, bagaimana ternyata kajian-kajian Wantannas ini bagus-bagus. Tapi kenapa kok kita belum banyak mendengarnya, apakah enggak sampai, apakah presiden tidak mendengar, dan kalau dilihat dari anggarannya, Rp50 miliar sekian. Program kebijakan strategi ketahanannya Rp7 miliar, program dukungan manajemennya Rp42 miliar. Jadi ini anggaran Setjen Wantannas untuk bekerja, bukan untuk membuat kebijakan, kira-kira begitu. Lebih besar untuk orang bekerjanya dari pada membuat kebijakan-kebijakan. Padahal tugasnya adalah membuat kebijakan-kebijakan.

Demikian Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Terima kasih Pak Nico.

Silakan Pak Dave, dan siap-siap Pak Muzzammil.

Kurang kencang Pak Dave, tidak kedengaran.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

(secara virtual, suara tidak terekam)

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Terima kasih Pak Dave.

Pak Muzzammil Yusuf, silakan.

F-PKS (DR. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.SI):

(secara virtual, suara tidak terekam)

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dari semua, sudah bertanya 8 orang, Ibu Christina tidak ingin bertanya? Tidak ya? Cukup? Ibu Christina nemenin Nurul. Memang perempuan kalau pergi, senangnya teman-teman. Kalau pria, teman-teman, aneh.

Saya persilakan Pak Gubernur Lemhannas untuk menjawab, mudah-mudahan bisa diclusterisasi dengan singkat, sehingga kalau berdasarkan tata tertib, kita jam 12 harus istirahat. Tetapi kita selesaikan saja ya, mungkin enggak sampai 12.30, dan saya mohon izin perpanjangan waktu.

Sekaligus juga kemudian Pak Sesjen, Pak Sekretaris Jenderal. Silakan Pak Gubernur dan Pak Sesjen.

GUBERNUR LEMHANNAS (LETJEN TNI (PURN.) AGUS WIDJOJO) :

Terima kasih.

Bapak Pimpinan Sidang dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Untuk masukan-masukan dan tanggapan terhadap Lemhannas, saya mengucapkan terima kasih banyak dari Pak TB Hasannudin, Ibu Nurul, kemudian Pak Anton. Kita pura-pura enggak kenal, ya Pak Anton ya? Suka main catur Pak, sama Pak Anton. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan itu juga banyak yang berdekatan, sehingga mungkin satu jawaban bisa untuk menjawab beberapa pertanyaan.

Saya mulai dari Pak TB tadi, ya, pertama adalah mengapa kok ada pernyataan-pernyataan alumni yang tidak sejalan dengan materi yang diajarkan di Lemhannas? Itu, kami sendiri juga merasa risih dengan hal ini, ada saya mengambil satu kasus kongkrit, ada satu orang. Kami mengadakan katakana *screening* terhadap para peserta itu memang kita tidak mengenal. Jadi kita dasarnya terutama adalah pada *screening* administratif. Peserta yang bersangkutan yang kemudian menjadi alumni, itu masuk mendaftar atas nama organisasi FKPP. Dan itu sudah memberikan jaminan sebetulnya. Tetapi ketika dia lulus, ternyata bahwa sebetulnya dibalik itu ada aspirasi-aspirasi lain. Dan dimulailah pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari materi-materi yang dibekalkan di Lemhannas.

Pada waktu itu kami berfikir, ada beberapa alternatif dari reaksi kami, apakah langsung ke publik ataukah kepada yang bersangkutan dan lain-lain. Pada akhirnya Lemhannas sudah mengeluarkan pernyataan, bahwa pernyataan itu adalah pernyataan pribadi yang tidak mewakili pendapat Lemhannas. Karena kalau kami serang itu pendapat pribadinya, maka di dalam era demokrasi, itu masuk di dalam kebebasan berpendapat, begitu. Kami hargai perbedaan, tetapi itu jelas tidak mewakili pendapat Lemhannas. Itu sudah jelas. Dia terus melakukan itu, dan toh akhirnya juga, akhirnya ditangani oleh Kepolisian, saat ini. Dan tidak berlanjut tentang masalah seperti itu.

Tapi juga di situ kita berpikir, apakah itu menjadi masalah wadah alumni yang itu dilakukannya oleh Ikatan Keluarga dan Alumni Lemhannas, atau itu kembali kepada Lemhannas? Mungkin kalau pencabutan ijazah mungkin itu bisa kembali kepada Lemhannas. Tapi memang itu tidak ada di dalam aturan atau pun Perpres, atau pun PerGub-nya, tentang reaksi seperti itu

terhadap fenomena-fenomena yang tadi disampaikan. Jadi mungkin ini juga sebagai masukan untuk melengkapi dasar-dasar legalitas di Lemhannas, agar kami bisa bereaksi lebih tegas, yang di *back-up* oleh adanya kepentingan yang berlaku, begitu.

Yang kedua adalah masalah

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Pimpinan, mohon izin, saya anukan saja, menambahkan.

Andaikan Beliau itu atas nama pribadi, *in person*, saya kira ini negara demokratis, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau menggunakan lambang-lambang Tanhana, kemudian juga mengatasnamakan Lemhannas, nah ini yang mungkin perlu kita sadarkan, itu saja, barangkali itu.

GUBERNUR LEMHANNAS (LETJEN TNI (PURN.) AGUS WIDJOJO) :

Baik Pak.

Sekarang ini juga kalau kita katakan itu Sherif lawan Indian, Indian itu makin pintar, Pak. jadi kita katakan, "jangan menggunakan atribut Lemhannas". Dia mengatakan, "saya tidak", karena itu bukan Tanhana Darma Manfa, tetapi kalau tidak salah itu yayasan atau apa itu ya, ada institusi di depannya. Sehingga itu memang bukan atribut Lemhannas. Dan kalau itu kami gugat, kalau itu nanti maju ke hukum, juga dia akan menang, begitu. Jadi itu semua telah kami pertimbangkan. Dan kami akan lebih hati-hati untuk ke masa depan. Tapi kita kembali baha kita lebih memasuki pada era demokrasi, dimana banyak kaidah yang perlu kita pertimbangkan kebebasan berpendapat, kemudian dasar-dasar legalitas, yang memang harus titik koma harus kita perhatikan itu, itu. Terima kasih atas atensinya, Pak TB.

Tentang masalah Papua, memang banyak sekali yang untuk bisa kita diskusikan di sini. Lemhannas juga sudah banyak mengadakan pengkajian-pengkajian tentang Papua. Dan dalam setiap pengkajian itu selalu ada pentahapan. Misalnya dengan melalui *round table discussion*, *focus group discussion*, jadi bertahap. Dan kami mengundang juga dari semua pemangku kepentingan, ada dari akademisi, ada dari pembuat kebijakan, ada juga dari mewakili pandangan terhadap Papua itu sendiri, ada juga dari organisasi-organisasi luar pemerintahan, sehingga kami mendapatkan pernyataan-pernyataan yang cukup komprehensif, itu maksud kami. Tetapi memang bahwa perlu juga sih untuk mengadakan pertemuan yang memang betul-betul mencakup semua aspek itu secara komprehensif.

Dan yang kedua adalah secara jujur kita bisa mengatakan dan secara terbuka. Ya misalnya tadi itu adalah hasil dari juga pembicaraan sebelum acara ini dimulai, yaitu misalnya bahwa ada kelemahan di dalam masalah administratif tata kelola pemerintahan itu sendiri.

Terus kemudian juga misalnya adalah kebijakan dari kita ini, untuk bisa dengan tegas untuk dilaksanakan dan memang memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan kebijakan tersebut. Misalnya saja apabila ada pengerahan kekuatan TNI misalnya, maka sebetulnya dasar hukumnya di sana apa? Karena kalau ada pengerahan, pengerahan kekuatan TNI di dalam sebuah kebijakan itu adalah dalam bentuk pengerahan satuan-satuan dengan landasan hukum yang jelas dan memberikan juga landasan hukum satuan TNI itu untuk melakukan operasi militer. Artinya, pengerahan satuan TNI dalam bentuk individu-individu, itu tidak akan mencapai efektivitas. Karena TNI bertugas dalam hubungan satuan.

Kemudian juga apa itu apa, *rules of engagement*, aturan pelibatangannya bagaimana? Apakah itu dalam rangka perkuatan operasi perbantuan TNI kepada pemerintahan? Pemerintahan siapa? Pemerintah daerah, di masa damai, atau memang ada pernyataan keadaan darurat? Nah ini semua akan membuat perbedaan tentang apa yang bisa dilakukan oleh TNI. Tapi kalau kepada TNI hanya kita anggap sebagai perkuatan untuk memperkuat Polri, misalnya, dan pengerahan dalam bentuk individu-individu, itu tidak akan efektif. Ini salah satu contoh saja, bahwa dalam setiap bidang itu memang banyak hal-hal yang bisa kita bahas.

Kemudian juga bagaimana, yang tadi disampaikan oleh Bapak, bagaimana seorang gubernur itu bisa menafikkan atau membatalkan keputusan produk hukum yang lebih tinggi? Nah ini berada pada wilayah politik. Kalau terhadap semua juga nanti, masalah-masalah yang ada, untuk mengidentifikasi secara akademik, itu memang sulit. Tetapi untuk mewujudkan, yang mewujudkan itu pada akhirnya adalah bukan yang mengidentifikasi masalahnya. Itu selalu akan berujung kepada kemauan politik, *political will*. Nah itu tidak berada pada pengkaji-pengkaji ini. Umumnya nanti akan ada di situ, tantangan-tantangannya. Kemudian, itu tidak mudah, dan itu mungkin juga lebih berada pada fungsi kontrol dari para anggota Dewan yang terhormat, untuk mengontrol tentang efektivitas implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan, dengan asumsi bahwa kebijakan itu pun juga sudah merata, dan mengenai kepada akar-akar permasalahan. Mengidentifikasi secara tepat, akar permasalahan. Jadi memang banyak aspeknya, dan memang kalau seperti tadi, di mana kita berbicara, saya sering atau kalau tadi misalnya ada yang mengatakan dari yang terhormat Bapak Anggota Dewan, "kok kami tidak pernah mendengar kajian". Kami juga bisa berbalik, kalau kami menempatkan diri sebagai warga masyarakat, kok warga masyarakat tidak pernah tahu juga sebetulnya bagaimana ini, apa, kebijakan yang dilaksanakan oleh kita. Saya menempatkan diri sebagai bagian dari Pemerintah, terhadap sebuah fenomena nasional, masalah nasional, gitu. Jadi memang perlu ada komunikasi politik, komunikasi publik, supaya betul-betul publik itu tahu, secara komprehensif masalahnya ini, anatomi permasalahan ini apa saja? Jadi tidak hanya mengikuti apa yang dimunculkan di media, yang kadang-kadang Cuma sektoral bahwa ini adalah hanyalah masalah HAM, bahwa ini hanyalah masalah satu dan lain hal. Jadi hal semacam itu. itu menjadi tantangan kita semuanya.

Kemudian selanjutnya adalah hal-hal tentang yang tadi disampaikan, yang ditanyakan kepada rekan saya dari Wantannas, saya tidak akan masuk ke wilayah itu, hanya titipan-titipan saja, titipan dari segi kepentingan Lemhannas, bahwa sekarang antara Wantannas dengan Lemhannas itu banyak menggunakan istilah yang sama, ketahanan nasional. Nah mohon nanti dalam rangka menertibkan lembaga Wantannas, betul-betul ada pembagian yang tegas, apa itu ketahanan nasional. Ini sebetulnya menjadi tanggung jawab Lemhannas atau Wantannas? Kita tahu bahwa Lemhannas itu utamanya adalah lembaga pendidikan dan pengkajian. Tetapi Wantannas juga melaksanakan pengkajian juga. Di situ muncul istilah ketahanan nasional juga. Nah kalau memang Wantannas ke masa depannya akan bernetamorfosis menjadi Dewan Keamanan Nasional, maka Dewan Keamanan Nasional (*rekaman terputus*)

Kemudian juga mengenai Bela Negara, pembentukan comcat, itu kita bisa lihat juga dari kalau enggak salah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan ketika Pak Ryamizard Ryakudu, bahwa hanya 20% dari Bela Negara itu yang menjadi kewenangan Kemenhan, yaitu membangun kemampuan awal, yang itu sebetulnya diarahkan nantinya dalam rangka pembentukan komponen cadangan. Tetapi di situ saya titipkan tentang adanya kedekatan nomenklatur ketahanan nasional antara Lemhannas dengan Wantannas.

Selanjutnya adalah bahwa vaksinasi, terus kemudian isu-isu komtemporer yang tadi disampaikan, memang ini tengah dalam proses untuk kita lakukan kajian-kajian terutama vaksinasi, yang sekarang perkembangan dari isu itu sendiri masih berkembang, masih berproses. Tapi memang ada rencana untuk bisa mengkaji tentang masalah tersebut.

Kemudian juga kembali di sini masalah-masalah isu komtemporer, banyak yang nantinya akan ditentukan tentang implementasi dari kebijakan atau pun kemauan politik. Seperti misalnya untuk diajarkan dari sejak PAUD atau pun usia dini, hal-hal yang menyangkut konsensus wawasan kebangsaan. Seperti tadi yang dicontohkan masalah di Sumatera Barat, kemudian tadi yang dicontohkan tentang satu dan lain hal. Maka kalau kita lihat, itupun juga bisa atau pun perlu untuk diwujudkan, dibekalkan kepada para warga negara yang masih berusia dini, dan itu masuk di dalam domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jadi memang di sini perlu untuk secara komprehensif melihat masalahnya, dan kemudian membagi-bagi kepada pemangku kepentingan secara fungsional. Bela Negara, misalnya, kalau dikatakan bahwa Bela Negara itu adalah intinya cinta tanah air dan membela Pancasila, maka kebanyakan kepentingannya adalah untuk diwadahi di dalam kurikulum pendidikan umum. Mulai dari sejak pendidikan dini, sampai dengan pendidikan tinggi. Intinya itu kan sebetulnya untuk mengembalikan kepada bentuk-bentuk yang dulu kita miliki. Nah itu berada pada domain siapa, ini menunjukkan bahwa sebetulnya juga bagaimana kita mendefinisikan Bela Negara, bentuk kongkritnya bagaimana, kalau nanti kita lihat bahwa sebetulnya juga Kementerian Pertahanan hanya memiliki sebagian kecil dari konsep Bela Negara, apabila Bela Negara diartikan sebagai cinta tanah air dan membela Pancasila. Kebanyakan itu ada di domain atau wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Materi-materi dari yang terhormat anggota Dewan, Pak Anton, terima kasih atas masukannya. Kajian di mana pilpres dan pilkada menjadi satu, atau pun pilkada serentak, itu lebih banyak mudharat atau manfaatnya, sudah memang lama ini menjadi materi pemikiran kami, sudah ada di dalam jadwal. Kajian tentang otonomi daerah juga Pak Mukhlis Basri, itu juga perlu ditinjau secara komprehensif. Artinya sekarang ini bukankah kita sekarang mengalami dobel otonomi. Di mana sebenarnya kita letakkan otonomi daerah, gitu kan, apabila itu pada tingkat II, maka bukankah semestinya kita ajarkan, tingkat I tidak punya otonomi. Konsekuensinya, jangan memberikan perangkat-perangkat otonomi pada tingkat I. Sekarang ini karena dari masa lalu kita punya asumsi, otonomi ketika Orde Baru itu ada pada tingkat I dan kemudian kita pindahkan pada tingkat II dan kita lengkapi, tapi di tingkat I itu masih mempunyai kelengkapan otonomi daerah. Sehingga secara praktis, dua tingkatan itu merasa memiliki otonomi, dan sebetulnya kita mempunyai dua lapis otonomi daerah, yang sebetulnya di dalam sistem tata kelola pemerintahan negara, itu hanya ada dua, yaitu pemerintahan pusat atau federal dan pemerintahan daerah, nah di mana kita meletakkan itu?

Untuk itu juga jangan kita memberikan kesan bahwa di tingkat I masih lengkap infrastruktur otonomi daerah, tapi sebetulnya otonomi daerah itu kita letakkan pada tingkat II. Jadi dua-duanya merasa punya otonomi daerah, itu. Nah itu juga tidak bisa hanya apa, secara mudah untuk kita identifikasi dan kita perbaiki secara tambal sulam, tapi ini juga menyangkut tentang latar belakangnya, mungkin juga dasar-dasar hukumnya dan lain-lain.

Kemudian selanjutnya generasi muda, bagaimana untuk lebih memperhatikan

F-PDIP (DRS. MUKHLIS BASRI):

Pimpinan, izin sebentar, Pimpinan.

Ya Pak Gubernur, walaupun artinya melaksanakan kajian ini, baik masalah Undang-undang Otonomi Daerah maupun masalah Undang-undang Pemilu tadi, ini harus mengikutsertakan para pelaksana, katakanlah para pelaku. Seperti Undang-undang Pemilu. Menyusun Undang-undang Pemilu itu sebenarnya harusnya didengarkan, kan tadi yang banyak meninggal itu di TPS. Artinya orang-orang pelaku ini di TPS, di KPPS, kades atau lurah, sudah itu camat, KPU, Bawaslu, bupati, Muspida, itu harusnya diundang untuk

mendiskusikan membahas masalah kajian-kajian seperti ini atau pembahasan undang-undang ini. Kalau hanya mengundang misalnya profesor-profesor ataupun apa namanya, universitas-universitas saja, mereka kan tidak tahu Pak, sebenarnya di lapangan itu bagaimana, kenapa orang itu meninggal, sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau pun membahas hal seperti ini, sekali lagi, harus pelaku-pelakunya itu diikutsertakan untuk mendiskusikan atau membahas hal seperti ini, termasuk juga masalah Undang-undang Otonomi Daerah tadi. Artinya kepala desa, camat, ya, karena saya sampaikan Pak, orang mau izin tambang saja ½ hektar, harus izin pusat, bagaimana orang mau mengurusnya, ya kan? Bagaimana mau menghidupkan rakyat yang katanya harus memberdayakan UKM, rakyat harus dipedulikan, kalau mereka mengurus izin yang 1 hektar atau ½ hektar saja. Ya mungkin kalau 10 hektar. Makanya mungkin seperti itu kan harus katakanlah di tangga, kalau yang mungkin ½ hektar, 1 hektar, cukup mungkin izin di pusat, eh di daerah, jangan harus ditarik semua, ya kan? Itu.

Saya kira itu Pak, terima kasih Pimpinan.

GUBERNUR LEMHANNAS (LETJEN TNI (PURN.) AGUS WIDJOJO) :

Baik Pak, terima kasih.

Mungkin ibaratnya analoginya adalah kami memimpikan dibangunnya jembatan-jembatan penyeberangan itu seperti di Thamrin-Sudirman, yang menghubungkan antara eksekutif, legislatif dan dunia pemikiran, apakah itu akademisi, apakah itu pengkajian, sehingga memang apa yang dihasilkan oleh pengkajian itu memang bisa betul-betul diakui dan diperlukan, baik itu oleh lembaga legislatif ataupun eksekutif. Kalau tidak, semua itu akan berjalan masing-masing, itu Pak.

Selanjutnya tadi itu dari Pak Dave, oh Pak Yusuf juga tadi keterlibatan influencer. Lemhannas tidak punya kewenangan operasional untuk langsung melaksanakan kebijakan atau hasil pengkajian. Lemhannas hanya menyiapkan para peserta yang memang berasal dari posisi-posisi kebanyakan adalah pejabat pemerintah, dan sekarang sudah dibuka kepada siapapun. Diharapkan, dan apa yang dibekalkan oleh Lemhannas itu adalah *core* konsensus dasar kebangsaan. MPR dulu menggunakan istilah 4 pilar, materinya sama sebetulnya, dan kita merujuk kepada keputusan MA untuk menggunakan konsensus dasar kebangsaan. Yang kita harapkan nanti ketika peserta Lemhannas itu lulus dan menduduki posisi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, itu akan diwadahi dan akan diakomodasikan di dalam kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Nah hal yang bisa dilakukan oleh Lemhannas adalah menyiapkan peserta ini sebaik mungkin untuk tidak gagap untuk menghadapi perkembangan lingkungan yang menjadi semakin terbuka, semakin dinamis, dan juga perkembangan lingkungan yang sudah diisi oleh generasi-generasi yang tidak terdiri dari hanya 1 generasi tunggal, yang ini akan menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Untuk itu memang Lemhannas sudah mengadakan penyesuaian-penyesuaian, yaitu dengan memberikan pembekalan tentang berpikir kritis kepada para pesertanya, sehingga diharapkan juga nantinya di dalam dinamika perkembangan lingkungan, bahwa nanti para lulusan itu juga bisa untuk, sudah terbiasa untuk secara kritis untuk menghadapi dinamika lingkungan yang penuh dengan perubahan.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Pak Gubernur, kalau bisa dipersingkat lagi, ini lebih kepada poin-poin saja, kalau dipersingkat lagi. Ini Bapak sudah jawab setengah jam ini, silakan.

GUBERNUR LEMHANNAS (LETJEN TNI (PURN.) AGUS WIDJOJO) :

Baik, terima kasih.

saya memang baru akan menyelesaikan tentang jawaban saya, saya ucapkan terima kasih, dan saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Terima kasih kepada Laksamana Madya Harjo Susmoro, mohon jawabannya atas permintaan, bisa dijelaskan, bisa atau tidak, tidak perlu terlalu detail soal situasi lapangannya. Kalau memang tidak bisa, poinnya ini. Jadi di sini tidak terlalu lama juga. Yang penting kajian Bapak atas permintaan teman-teman ini, nantinya bisa dilaksanakan.

Silakan Pak.

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Terima kasih Pimpinan Rapat.

Saya akan mencoba menjawab atau menjelaskan secara komprehensif, mudah-mudahan tidak mengulang tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Pada intinya pertanyaan berkaitan dengan masalah ke-wantannas-an, kemudian masalah apa yang dikerjakan masalah Bela Negara, kajian tentang Bela Negara, Covid, kemudian masalah tentang otonomi daerah dan juga masalah kepemudaan tadi lebih masuk kepada masalah Bela Negara.

Mungkin saya coba pertama masalah ke-wantannas-an. Ada pemahaman yang sedikit kalau mungkin kalau kita bisa dikatakan keliru atau mungkin kurang komprehensif, adanya euphoria reformasi, sejak adanya reformasi ini kemudian pemahaman masalah keamanan menjadi sumir. Dari bahasa *security* yang harusnya begitu baca keamanan itu ada keamanan besar, ada keamanan kecil. Nah ini seolah-olah mau dibedakan. Pertahanan dan keamanan menjadi berbeda, padahal tergantung dari mana sisi kita melihat, maka di situ keamanan. Keamanan dalam konteks negara, maka menjadi keamanan nasional, pertahanan adalah bagian dari keamanan nasional. Pada saat kita bicara tentang pertahanan, maka di situ juga perlu ada suatu keamanan juga, sebenarnya. Mungkin itu secara garis besar demikian, sehingga mungkin akhirnya dampak dari perbedaan ini dan masing-masing kepengen eksis, maka tadi muncul apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal TB Hasanudin, adanya otot-otot itu, masalah Undang-undang Keamanan Nasional.

Mungkin sedikit berbeda dengan Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional ini merupakan forum kenegaraan, sebenarnya. Ada forum politik dan forum kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara, dan juga sebagai kepala pemerintahan. Selama ini secara ilmu ketatanegaraan, presiden lebih banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan sebagai kepala negara, di mana dia menyangkut salah satunya adalah, kalau mungkin bisa ditayangkan tadi slide nomor 18, yang berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan nasional, maka di sini intinya adalah kepentingan nasional, aman dan sejahtera.

Nah pada saat kepentingan aman, di sini semua aspek ikut. Selama ini sidang kabinet dihadiri oleh Panglima TNI dan oleh Kapolri, yang seharusnya dia tidak hadir di situ, tapi hadirnya adalah di forum kenegaraan. Karena forum kabinet itu adalah forum politik. Sehingga

persoalan-persoalan kenegaraan yang menyangkut masalah keamanan nasional, itu masalah kenegaraan. Sehingga di sini harus diselesaikan secara utuh, semua hadir. Jika Dewan Ketahanan Nasional atau Wantannas, sebenarnya itu adalah Dewan Keamanan Nasional yang kita miliki sekarang ini. Cuma memang dari awal sejarah tadi sudah kita sampaikan, dari awal ada, berawal dari Dewan Keamanan dan seterusnya, sampai akhirnya didegradasi menjadi Dewan Ketahanan. Yang tadinya undang-undang menjadi Keppres.

Nah ini yang akhirnya tidak berfungsi secara optimal. Ke-wantannas-annya tidak berfungsi, tidak jalan, hanya kesekretariatan Wantannas itu yang berjalan. Sehingga muncul tadi, ada kajian-kajian.

Sebenarnya kajian hanya metode untuk menyelesaikan masalah, bukan tugas pokoknya sebenarnya. Dari kajian itu, kemudian akan disampaikan menjadi rancangan kebijakan. Sehingga memang tidak dipublikasikan, langsung kami kirim ke presiden. Beliau memutuskan mau diteruskan dalam sidang atau tidak. Harusnya ada Sidang Dewan, tapi Sidang Dewan tidak pernah dilaksanakan. Kami hanya sampai mentok, sampai dengan pra sidang, karena pra sidang kami yang memimpin, untuk menyusun suatu rancangan kebijakan. Nah rancangan kebijakan inilah yang kita serahkan ke presiden.

Kita tidak dipublikasikan, karena kuatir kalau itu dikasihkan, ini akan menjadi pedoman *stakeholder*, seolah-olah bahwa itu sudah keputusan arahan dari Wantannas, ini bahaya, sering dijadikan demikian. Padahal ini adalah presiden. Dulu selaku kepala negara yang dia akan memberikan nasehat kepada presiden selaku kepala pemerintahan, untuk membuat suatu kebijakan. Ini mekanisme ini tidak berjalan.

Mudah-mudahan dengan Wankamnas nanti berjalan, ini akan mekanisme ini berjalan. Dan yang bekerja di situ, anggotanya adalah seluruh kementerian. Seluruh kementerian, termasuk di situ anggota tetap. Anggota tidak tetapnya adalah tokoh masyarakat, para praktisi, para ahli, kemudian akademisi, bila diperlukan sesuai dengan materi yang akan dibahas. Sebab ini merupakan forum yang sangat kompleks, untuk bagaimana menjaga agar negara ini aman, bagaimana sejahtera, itu adalah di forum yang berbeda. Jadi ini mungkin sedikit gambaran,

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Saya izin menambahkan, Pak Pimpinan.

Begitu Pak, yang pertama itu waktu itu dibikin oleh negara, oleh pemerintah, atas inisiatif pemerintah, RUU Keamanan Nasional. Dari situ lahirlah namanya Dewan Keamanan Nasional. Jadi tidak bisa serta-merta langsung membuat Dewan Keamanan Nasional tanpa ada tupoksi, batasan-batasan tentang keamanan nasional itu. Nah begitu, itu saja. Dan ini nanti kalau terus digelindingkan, masyarakat sipil akan menolak mati-matian. Dan tentu DPR harus mendengarkan masyarakat sipil maupun pemerintah. Bahwa poin Pak Sesjen itu bahwa keamanan nasional itu adalah penting, iya, penting. Tidak ada yang mengaburkan soal itu. Nah sehingga kami ingin berbicara secara akademis, nah.

Tadi batasan-batasan keamanan nasional kalau mengikuti Dewan Keamanan PBB, ada enam Pak, masih kurang itu dua. Jadi soal keamanan. Termasuk keamanan pekerjaan, keamanan *food security*, dan sebagainya, dan sebagainya itu, ya. Itu harus menjadi. Kalau seperti ini, dengan segala hormat, untuk apa? Kan ada fungsi tadi, Menko, begitu. Tapi mungkin nanti tidak usah diperpanjang, nanti sajalah sambil ngopi di Wantannas lah kita diskusi ya?

Oke, terima kasih.

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Terima kasih Pak.

Ini sudah disosialisasikan Pak, sudah disosialisasikan dan bahwa sedikit berbeda masalah Wankamnas, dengan undang-undang. Makanya pada RPJMN yang pertama, 2015-2019, itu memang mengacunya kepada pembentukan undang-undang dulu baru Dewan Keamanan Nasional. Namun di ... undang-undang, saya ulangi, RPJMN 2020-2024, di situ penekanannya adalah kepada pengelolaan keamanan nasional, yang intinya adalah sebenarnya untuk mempercepat agar Dewan Keamanan Nasional ini bisa dijalankan dengan, sesuai dengan aturan main yang, dan kita sudah membuat rancangannya, Perpresnya. Sebenarnya tidak akan mengganggu kepentingan kementerian yang lain, maupun menko. Menko hanya beberapa menteri, sedangkan dalam konteks Dewan Keamanan, langsung presiden memimpin, untuk masalah kedaruratan, lebih kepada bagaimana menghadapi kedaruratan bagi yang sifatnya potensial maupun yang faktual. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Kalau sekarang darurat, memang tidak bisa presiden mengumpulkan para pembantunya?

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Betul Pak, bisa sekali, bisa sekali.

Cuma forumnya ini selama ini menggunakan forum sidang kabinet, Pak, yang sebenarnya sidang kabinet bukan untuk itu. Forumnya harusnya forum negara, Pak.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Sidang kabinet untuk apa?

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Sidang kabinet lebih kepada forum politik. Sebenarnya tergantung presiden, Pak. Presiden dalam dirinya, Beliau adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebenarnya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Mohon maaf, kok Cuma forum politik? Pak, saya ini pernah notulen di 5 presiden Pak, sebagai ajudan 5 presiden dan sekretaris militer. Bukan forum politik, bukan, justru itu forum eksekutif, menghasilkan atau membuat eksekutif, eksekutor-eksekutor untuk dilaksanakan. Kalau ini, forum politik nih. Begitu. Karena di DPR. Nah nanti mungkin kita diskusikan sambil ngopi ini.

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Terima kasih Pak, kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut.

Yang kedua, tadi yang disinggung oleh Bapak Gubernur, yang berkaitan dengan masalah kajian. Memang kajian untuk Wantannas itu hanya sebagai alat, Pak, jadi untuk sebenarnya outputnya bukan kajiannya itu sebenarnya. Outputnya adalah ini menjadi bahan untuk kebijakan Bapak Presiden. Dan dalam kajian tersebut kita menggunakan metode kajian, kunjungan daerah dan juga kunjungan luar negeri untuk melaksanakan studi banding, dan itu dihadiri oleh semua stakeholder.

Jadi kalau tadi ada kekuatiran, bukan hanya anggota Wantannas saja, tapi kita undang juga semua stakeholder, dari kementerian, lembaga, dan juga dari para pakar dan sebagainya sesuai dengan bidangnya. Kajian-kajian tadi, apakah diteruskan atau tidak, kami teruskan kepada presiden, tadi ada sejumlah 78.

Salah satunya yang ditanyakan berkaitan dengan masalah Covid, kami sudah mengajukan berkaitan dengan masalah Covid, sudah cukup banyak sebenarnya. Pertama masalah solusi terstruktur kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pencegahan Covid-19 di masyarakat, misalkan. Ini menjadi ke depan, sudah kita ajukan dan kemudian ditindaklanjuti, karena persoalannya kadang kajian itu tidak langsung presiden, tapi lewat Setneg. Nah ini kadang yang jadi agak telat Pak, agak telat. Dan masih banyak lagi kajian-kajian termasuk yang berkaitan dengan masalah pilkada, kita juga sampaikan hasil kajian tersebut, berupa ke depan, antisipasi dan solusi pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid.

Yang berikutnya berkaitan dengan masalah Bela Negara dan termasuk tadi keterlibatan para pemuda. Bela Negara selama ini dipahami hanya Bela Negara dalam konteks pertahanan. Sebenarnya Bela Negara itu menyangkut seluruh aspek kehidupan dari 8 gatra, sehingga di sini mungkin tidak bisa hanya tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, dari Kemhan itu hanya bagian dari 8 gatra tersebut. Sementara Bela Negara itu termasuk bagaimana Bela Negara bagi para pelaku politik, Bela Negara dalam ideologi, Bela Negara dalam kegiatan ekonomi, Bela Negara dalam kegiatan, seluruhnya ada 8 aspek, sebenarnya. Kemudian kegiatan Bela Negara sudah berjalan, untuk Wantannas, namun dengan adanya undang-undang yang baru dan diserahkan kepada Kemhan, maka di sini Wantannas sudah melaksanakan kegiatan, tapi aspeknya tadi bukan dalam aspek Bela Negara aspek hanya pertahanan saja, tapi sudah seluruh aspek, dan kita sudah membuat modul-modul tentang pedoman konsep pelaksanaan Bela Negara, dan ini sudah disebar dan ini sudah menjadi acuan. Buku petunjuk, modul implemetasi Bela Negara, ToT Penyiapan Wisesa Utama dan lain sebagainya.

Kemudian yang berkaitan dengan, saya kira mungkin secara umum, demikian Bapak, yang bisa saya sampaikan. Berkaitan dengan masalah, jadi mungkin yang paling penting adalah isu aktual yang sudah kami sampaikan terakhir, berkaitan dengan masalah Dewan Keamanan Nasional tentang pentingnya Dewan Keamanan Nasional. Memang ini masih apa namanya, banyak tadi pro kontra, tapi sudah kami coba sosialisasikan tentang apa itu Dewan Keamanan Nasional. Kalau tidak, Wantannas selama ini memang tidak jalan Pak, karena Wantannas mohon maaf, kita hanya bekerja lebih kepada kesekretariatannya saja, sedangkan fungsi dari Wantannas sesungguhnya adalah sebagai lembaga untuk memberikan, membuat rancangan kebijakan nasional di bidang strategi nasional, ini belum berfungsi secara optimal, sehingga mungkin ini yang harus akan kita coba. Karena banyak undang-undang masalah, mengenai kebijakan-kebijakan masalah kedaruratan. Contoh yang penanganan masalah Covid di sini, seharusnya di dalam forum Wankamnas itu diselesaikan, seluruh stakeholder sudah

langsung hadir pada saat itu, dan siapa berbuat apa, tidak secara parsial-parsial. Diharapkan ke depan, persoalan-persoalan kenegaraan khususnya di bidang keamanan ini bisa diselesaikan secara komprehensif, holistik, dan integral.

Demikian, terima kasih, mohon maaf apabila kurang sempurna dalam memberikan balasan, eh jawaban. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Harjo Susmoro.

Ibu/Bapak,

Menurut aturan saat Covid ini, kita 2,5 jam harus selesai. Ini kita 2,5 jam, saya mohon izin ya, kita tambah 10 menit lagi ya, Pak Anton? Lima menit lagi ya?

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang saatnya kita membuat kesimpulan Rapat Dengar Pendapat. Ini ada kami coba mewujudkan dengan bahasa yang sederhana, memang kedua lembaga ini kita harus melakukan penguatan sebesar-besarnya, supaya tetap eksis.

Yang pertama, perihal Lemhannas. Ada 4 kesimpulan:

Yang pertama, Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Lemhannas Tahun Anggaran 2020 terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2015-2019 dengan opini WTP. Hasil kinerja pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2020 oleh Kemenkeu dengan nilai 97,84%. Ini maksudnya serapan pendidikan kader pimpinan tingkat nasional dan program pemantapan pimpinan daerah, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, kajian dalam berbagai bidang strategis, kegiatan pengukuran ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional.

Kedua, Komisi I DPR RI memahami realisasi anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp176.265.110.244,00 atau sebesar 93,05% dari pagu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp189.431.020.000,00.

Ketiga, Komisi I DPR RI prihatin, ini kita cuma bisa prihatin Pak, kalau mendorong, kita enggak punya pegangan, itu ada di *World Best Finance Minister for 3 years in arrow*, Komisi I DPR RI prihatin pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Lemhannas semula sebesar Rp182.375.470.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp168.554.503.000,00. Untuk selanjutnya Komisi I DPR RI mengharapkan program prioritas dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan pada RKP.

Keempat, terkait dengan isu-isu aktual, Komisi I DPR RI mendorong Lemhannas untuk terus melakukan kajian strategis yang diperuntukkan sebagai bahan masukan kepada pemerintah, dalam rangka menuju capaian sasaran pembangunan nasional.

Wantannas.

Satu, Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Wantannas, di sini apresiasi itu biasanya keberpihakan hati, Pak, di sini biasanya orang menghujat atau mendesak. Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Wantannas tahun anggaran 2020 antara lain telah melaksanakan berbagai kajian dan perolehan penghargaan dari Kemenkeu atas predikat Opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut, dari Tahun 2009 sampai dengan 2019.

Dua, Komisi I DPR RI memahami, bukan prihatin ini, memahami realisasi anggaran, oh ini yang nomor tiga, Wantannas tahun 2020 sebesar Rp45.884.008.145,00 atau sebesar 93,54% dari pagu tahun anggaran 2020 sebesar Rp49.051.252.000,00. Terkait dengan pagu alokasi anggaran Wantannas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.436.830.000,00, Komisi I DPR RI mendorong Wantannas untuk mengimplementasikan APBN Tahun Anggaran 2021 secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan RKP.

Empat, terkait dengan isu-isu aktual, Komisi I DPR RI, maaf, terkait dengan isu-isu aktual, Komisi I DPR RI mendorong Wantannas untuk terus meningkatkan tugas, peran, dan fungsi seiring perkembangan zaman yang semakin terbuka dengan adanya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan media sosial yang akan dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan.

Saya tawarkan kepada teman-teman anggota, kalau mau ada yang diperbaiki. Saya rasa cukup ya? Ini lebih kepada dorongan yang sifatnya normatif. Memang di para petinggi republik ini, dua lembaga ini sudah di dalam *top of mind*-nya mereka. Ini tugas kita mengamplas otak-otak para bos itu.

Saya kembalikan sekarang, Pak Gubernur Lemhannas, apa setuju dengan kesimpulan ini?

GUBERNUR LEMHANNAS (LETJEN TNI (PURN.) AGUS WIDJOJO) :

Setuju, Bapak Pimpinan, kami menghargai, Bapak Pimpinan membagi secara adil kesimpulan antara Wantannas dengan Lemhannas, Pak.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Pak Harjo, monggo.

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Terima kasih Pimpinan.

Kami setuju dengan apa yang tadi disampaikan, kami juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, kami mengucapkan terima kasih atas keprihatinan, atas apresiasi, dan atas keberpihakannya kepada kami khususnya di Wantannas dan juga Lemhannas.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Sebelum kami tutup, tadi saya sempat tanya, teman-teman tahu tidak kantornya Wantannas di mana? Rata-rata tidak tahu. Ini termasuk saya juga tidak tahu, rupanya saya tanya, oh di Kemenhan ya?

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Di belakangnya, satu kompleks dengan Menkopolhukam, dengan Menteri Wanita, Pak.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Oh di Hankam?

SESJEN WANTANNAS (LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS., S.H., S.PI., M.H.) :

Mohon sekali-kali dikunjungi, Pak.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Ya kami nanti akan datang, tidak usah repot-repot, asal ada kopi, boleh merokok, saja.

Saya rasa kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di tengah Covid yang sangat menakutkan ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dengan mengucap syukur *alhamdulillah*, dengan ini Rapat Dengar Pendapat dengan Lemhannas dan Wantannas kami tutup.

Hasbunallahu Wani'mal Wakil, Ni'mal Maula Wa Ni'mannassir.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB)
(KETUK PALU: 3X)**

Jakarta, 27 Januari 2021
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

SARTOMO, S.S., M.SI
NIP. 19680811 199603 1001